

Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Evaluation of The Presentation and Disclosure of Financial Statements at The North Sulawesi Provincial Education Office in 2020

Jihan Alkatiri¹, Lintje Kalangi², Dhullo Afandi³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: jihanalkatiri33@gmail.com¹, lintjekalangi@yahoo.com², afandiafandibaksh@gmail.com³

Abstrak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, PSAP No. 1 mengatur tentang penyajian laporan keuangan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan penyeragaman penyajian laporan keuangan untuk mencapai pencapaian bersama, yaitu merumuskan laporan keuangan bersama untuk meningkatkan pelaporan keuangan dan perbandingan antara anggaran, periode dan entitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan prinsip Akuntansi yang lazim. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan evaluasi laporan keuangan terkait Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara sebenarnya telah memenuhi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci: Evaluasi, Penerapan, Belanja Modal

Abstract : Based on Government Regulation No. 71 of 2010, PSAP No. 1 regulates the presentation of financial statements, which aims to achieve the goal of uniformization of the presentation of financial statements to achieve joint achievements, namely formulating joint financial statements to improve financial reporting and comparison between budgets, periods and entities. The purpose of this study is to evaluate the presentation and disclosure of financial statements at the North Sulawesi Provincial Education Office in accordance with the usual accounting principles. The method is qualitatively descriptive. The results of the study obtained that based on the evaluation of financial statements related to the Education Office of North Sulawesi Province had actually met and followed the provisions set out in Government Regulation No. 71 of 2010.

Keywords : Evaluation, Application, financial statements

PENDAHULUAN

Dengan adanya standar Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang mengatur pelaporan keuangan seluruh Pemerintah Daerah, maka akan tercipta keseragaman dalam hal penyajian laporan keuangan, sehingga daya banding dalam penyajian laporan keuangan pun dapat tercipta. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 membuat laporan keuangan yang disusun menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugasnya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya berkaitan dengan pengelolaan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Langelo (2015) dkk pernah melakukan penelitian tentang suatu penerapan analisis tentang standar Akuntansi pemerintah yang berbasis akrual yang penyajian dalam pelaporan keuangan pemerintahan kota Bitung, menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan masih didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 berbasis CTA (*Cash Toward Accrual*) dan berbasis kas menuju akrual. Hal ini memberikan hipotesis bahwa belum semua instansi pemerintah di Sulawesi Utara telah menrapkan SAP berbasis akrual.

Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini dibeberapa instansi pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Opini diberikan terhadap laporan keuangan karena BPK mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum benar, kurangnya Kompetensi Staf Akuntansi yang ada serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern yang belum memadai.

Permasalahan yang sering timbul karena adanya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 seperti pos-pos atau item-item laporan keuangan yang berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Oleh karena itu, pembuatan laporan keuangan pada instansi pemerintah diharapkan agar basis Akuntansi yang digunakan sesuai dengan penerapan perlakuan Akuntansi atas transaksi pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara adalah SKPD yang membuat laporan keuangan dan berdasarkan penelitian awal yang penulis dapatkan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara khususnya pada LRA (laporan realisasi anggaran) belum sepenuhnya mengikuti aturan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengevaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi.

Pengertian Akuntansi dapat dijelaskan melalui 2 pendekatan, yaitu dari segi proses dan segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, Akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya didalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan. Dilihat dari segi fungsinya, Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif. Terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan (Elsye dkk 2016:17).

Akuntansi Pemerintahan

Elsye dkk (2016:39) Akuntansi pemerintahan adalah bidang Akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Akuntansi pemerintah memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Jika Akuntansi negara ini tidak dilakukan tentu penghasilan dan pengeluaran negara tidak akan terkomunikasi dengan benar. Pada umumnya, Akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu.

Akuntansi Pemerintahan.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 memutuskan tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, dimana dalam penerapannya dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual (sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010). Penerapan SAP berbasis kas menuju akrual dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2014, artinya tahun 2015 Pemerintah Indonesia harus menerapkan basis akrual secara penuh.

Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 memutuskan

tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, dimana dalam penerapannya dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual (sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010). Penerapan SAP berbasis kas menuju akrual dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2014, artinya tahun 2015 Pemerintah Indonesia harus menerapkan basis akrual secara penuh

Penelitian Terdahulu.

Andi Lombar (2015). Tentang Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado tahun 2015 mendapatkan hasil Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah manado tahun 2015 adalah 52,94%, hal ini menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah kota manado belum memenuhi semua item pengungkapan dalam PP NO 71 tahun 2010 tantang standar Akuntansi pemerintahan.

M. Zaenuddin Asyrofi (2016). Tanteng Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Total aset dan temuan pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variable jumlah SKPD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Gita Desipradani, Zeni Rusmawati/ (2017). Tentang Penyajian laporan keuangan pemkot Surabaya dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Hasil penelitian ini, penyajian laporan keuangan pemerintah kota surabaya sudah dibuat berdasarkan PP. No 71 Tahun 2010, meski kendala terjadi dalam proses penyajiannya, namun akuntabilitas serta transparansi keuangan pemerintah kota Surabaya bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak membutuhkan informasi keuangan daerah.

Mochammad fajar A (2018). Tentang Analisis penerapan Akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah kabupaten kotawaringin barat provinsi Kalimantan tengah) Hasil penelitian ini, kabupaten kotawaringin barat baru mulai menerapkan PP. No 71 tahun 2010 dengan melakukan penyesuaian data yang ada di PP. No. 24 tahun 2005 pada tahun 2015 ini, yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan SDM, secara kuantitas masih belum memiliki kualitas yang baik namun pemerintahan kabupaten kotawaringin barat mengubah laporan keuangan daerah yang awalnya PP. No. 24 tahun 2005 ke PP No. 71 tahun 2010 dengan bantuan teknisi Akuntansi.

Yunita Kurnia Shanti (2018). Tentang Analisis penerapan basis akrual atas standar Akuntansi pemerintah No 71 dan dampaknya pada penyajian laporan keuangan (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kecamatan ciputat timur), Hasil penelitian menunjukkan penerapan basis akrual pada penyajian kelima laporan keuangan telah sesuai dengan SAP 71 tahun 2010. Untuk pengungkapan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas belum dijelaskan secara memandai dalam CALK. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya sistem Akuntansi basis akrual (SIMRAL) bahwa penyusunan laporan keuangan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi, serta dapat memberikan informasi realisasi anggaran dan dipantau secara langsung oleh manajemen guna membantu pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan analisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data lalu akan dikelompokkan dan disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan serta berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga untuk kemudian dapat diambil atau ditarik suatu kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan didinas pendidikan daerah provinsi Sulawesi Utara, yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 35, Wenang Utara, kecamatan wenang, kota Manado Sulawesi Utara. Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2021 sampai dengan selesai.

Jenis,Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data kuantitatif berupa data yang dapat diukur dalam skala numerik dan dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan yaitu laporan keuangan neraca yang ada di dinas pendidikan.

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik yaitu berupa deskripsi prosedur secara naratif atau kata-kata dan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data mengenai kondisi instansi, sejarah instansi, profil instansi, struktur organisasi instansi, hasil wawancara dengan pihak instansi.

Sumber Data

Data primer; sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Data sekunder; data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung, melainkan melalui media perantara yaitu melalui hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal, artikel, majalah dan berbagai publikasi serta organisasi terkait yang relevan dengan masalah yang diangkat. Selain itu, penulis juga mendapatkan data-data dari internet yang menyediakan informasi lainnya berkaitan dengan konsep penelitian.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*), berupa Tanya jawab dengan narasumber di dinas pendidikan provinsi Sulawesi Utara. Wawancara yang dilaksanakan menggunakan metode wawancara bebas, dimana peneliti bebas menanyakan apa saja namun tetap memperhatikan kaitan pertanyaan dengan data yang diperlukan, sehingga hasilnya diharapkan akan sesuai dengan realita yang terjadi tanpa ada penambahan maupun pengurangan dari narasumber. Narasumber yang peneliti pilih yaitu orang-orang yang berhubungan langsung dengan pencatatan laporan keuangan di dinas pendidikan provinsi Sulawesi Utara antara lain : kepala kasubag keuangan, bendahara dinas pendidikan, dan pegawai yang ada di bagian keuangan.
2. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara melakukan atas data-data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber meliputi jurnal ilmiah, buku-buku, dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan topik yang diteliti.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat secara langsung dokumen, catatan-catatan dan buku-buku yang digunakan.

Metode Proses Analisis Data

Dalam proses analisis ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data dan mencatat semua data sesuai dengan hasil wawancara, studi pustaka dan dokumentasi mengenai analisis pencatatan laporan keuangan yang dilaksanakan dinas pendidikan provinsi Sulawesi Utara.
2. Tahap kedua, peneliti melakukan perbandingan terhadap bentuk laporan keuangan dari dinas pendidikan provinsi Sulawesi Utara dengan PP No, 71 tahun 2010 apakah telah sesuai atau belum.
3. Tahap ketiga, peneliti melakukan perbandingan terhadap format dan isi dari laporan keuangan apakah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan telah sesuai dengan PP No, 71 tahun 2010.
4. Tahap keempat, apabila ditemukan tidak sesuai terhadap bentuk, format, dan isi akan di usulkan atau diberikan solusi agar hal tersebut dapat sesuai dengan PP No, 71 tahun 2010.
5. Tahap kelima, merupakan tahap terakhir dimana peneliti menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil penelitian yaitu dinas pendidikan provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan prosedur pencatatan laporan keuangan dan telah sesuai dengan PP No, 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Penyajian dan Pengungkapan didinas pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Pada laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari tujuh komponen laporan keuangan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara hanya menyajikan lima komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit. Laporan realisasi anggaran yang diberlakukan berbasis Kas dalam pengakuan semua proses pertukaran materi pada waktu terjadinya proses pemasukan dan keluarnya dana kas.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara menurut data tahun 2020 disajikan dengan klasifikasi pendapatan LRA menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Lampiran Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember Tahun 2020 sebesar Rp37.000.000.00. Sedangkan, realisasi belanja Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 ialah sebesar Rp873.917.295.946,00 yang terdiri dari:

1. Belanja operasi sebesar Rp723.939.592.002,00
2. Belanja modal sebesar Rp149.977.703.944,00

Surplus/defisit Tahun 2020 merupakan fakta yang membandingkan antara diwujudkannya pendapatan daerah yang dikurangkan dengan Realisasi Belanja, dengan rincian yang terdiri dari:

3. Jumlah realisasi pendapatan daerah sebesar Rp37.000.000.00
4. Jumlah realisasi belanja daerah sebesar Rp873.917.295.946,00
5. Surplus/Defisit sebesar (Rp873.917.295.946,00)

Dalam hal ini, pencatatan anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

dibuat dengan mendasari data pendapatan dan juga pembiayaan yang telah dibenarkan pada saat kas diterima Rekening Kas Umum baik Negara maupun Daerah. Realisasi pendapatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulut sebesar Rp1.016.000.00 yang berasal berasal dari retribusi. Sedangkan belanja merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara umum daerah untuk pembelanjaan dimana jumlah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulut. Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.137.429.878.802,00 dan terealisasi sebesar Rp873.917.295.946,00 atau mencapai 76,83% yang berasal dari Belanja Operasi (pengeluaran yang berhubungan dengan kesejahteraan pekerja, dan pengeluaran dana dalam hal barang dan jasa), Belanja Modal (belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal dana bos).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang mencakup item-item pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan. Sedangkan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulut hanya menyediakan pendapatan dan belanja dimana pendapatan dan belanja tersebut menggunakan basis kas.

Secara umum, setelah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dapat diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara disusun dengan menggunakan sistem realisasi pembayaran, yang berarti Pendapatan Pembiayaan adalah diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, dan beban, transfer dan biaya pembiayaan diakui pada saat penarikan kas dari kas daerah

Neraca

Neraca memiliki peran untuk memberi gambaran akan posisi laporan keuangan yang dapat diuraikan menjadi beberapa poin, yakni posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca merupakan kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas melalui laporan keuangan.

Penyajian Laporan Neraca pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Utara mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2020. Klasifikasi aset meliputi aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

Neraca yang disajikan organisasi perangkat daerah (ODP) merupakan gambaran posisi keuangan per 31 Desember 2020, dimana hal tersebut dibagi lagi menjadi beberapa poin, terdiri dari aset dengan total jumlah Rp. 145.707.640.753.78, kewajiban sebesar Rp. 18.942.063.987,00.

- a. Jumlah aset sebesar Rp. 145.707.640.753.78, yang terdiri dari; 1). Aset lancar sebesar Rp. 00.0
- b. 2). Aset tetap sebesar Rp.142.950.364.190.00 3). Aset lainnya sebesar Rp.2.757.276.563.78
- c. Jumlah kewajiban sebesar Rp 18.942.063.987.00
- d. Ekuitas sebesar Rp. 126.765.576.766.78

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintah, dalam hal ini laporan keuangan yang menyajikan laporan keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas.

Laporan Operasional

Penyajian Laporan Operasional pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Provinsi informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Dinas Pendidikan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 disajikan komparatif dengan tahun 2019.

Dilihat dari penjelasan diatas, pada Dinas Pendidikan dalam Laporan Operasional sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mana laporan operasional disusun dengan menggunakan basis akrual yaitu seluruh transaksi ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan. Pada Laporan Operasional tidak ada penambahan pos-pos yang menyajikan hasil operasi suatu entitas pelaporan

Hal-hal yang diungkapkan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Terkait Dengan Pendapatan Yaitu. Perbandingan PAD-LRA tahun 2019 dengan tahun 2020, dan Perbandingan realisasi Belanja tahun 2020 dengan tahun 2019 mulai dari Belanja Modal dan Belanja Operasi yang diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp768.118.543,60 atau 370,01% dari target sebesar Rp207.596.462,00. Jika dibandingkan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi sebesar Rp2.175.134.419,76 Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp1.407.015.876,16 atau 64,69%.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp873.917.295.946,00 atau 76,83% dari Belanja operasi realisasi sebesar Rp723.939.592.002,00 atau 74,28%, Belanja Modal realisasi sebesar Rp149.977.703.944,00 atau 92,12%.

Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Operasional pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara menyajikan pos-pos seperti Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh

perubahan kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Dan Ekuitas akhir.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara yang diuraikan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas tahun anggaran 2020 sebesar Rp130.913.185.865,78 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp136.837.415.140,83 mengalami penurunan sebesar Rp5.924.229.275,05 atau 4,33%.

2. Defisit – LO sebesar Rp(743.282.482.549,40) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp(729.596.729.917,24) mengalami kenaikan defisit sebesar Rp13.685.752.632,16 atau 1,88%.

3. Kewajiban untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2020 sebesar Rp873.149.177.402,40 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2020. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp981.110.853.153,19 mengalami penurunan sebesar Rp107.961.675.750,79 atau 11%.

4. Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2020 sebesar Rp103.828.031.754,78 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2020. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp130.913.185.865,78 mengalami penurunan sebesar Rp27.085.154.111,00 atau 20,69%.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan dalam bentuk penjelasan terkait rincian komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan, dengan adanya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dapat memberikan informasi tentang pencapaian target keuangan selama satu tahun pelaporan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat peranan pelaporan dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN ORGANISASI

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran rejalisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas Akuntansi dan entitas pelaporan, basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta kesesuaian penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi pemerintahan.

BAB IV PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan; pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbal sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

Pembahasan

Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang mencakup item-item pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan. Sedangkan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara hanya menyediakan pendapatan dan belanja dimana pendapatan dan belanja tersebut menggunakan dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setelah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Neraca Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setelah dibandingkan dengan laporan keuangan yang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara maka Neraca sudah sesuai dengan PP Nomor 71, yang terdiri aset, kewajiban dan ekuitas. Yang mana aset lancar terdiri dari kas&setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan untuk aset tetap Terdiri dari tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, tetapi pada aset tetap terdapat penambahan yaitu akumulasi penyusutan karena aset tetap disusutkan. selama kapasitas tersebut semakin menurun karena adanya kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka aset tetap tersebutpun menurun.

Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setelah dibandingkan dengan laporan keuangan yang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara maka Neraca sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71, yang terdiri aset, kewajiban dan ekuitas. Yang mana aset lancar terdiri dari kas&setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan untuk aset tetap terdiri dari tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, tetapi pada aset tetap terdapat penambahan yaitu akumulasi penyusutan karena aset tetap disusutkan.

Dilihat dari penjelasan diatas, pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dalam Laporan Operasional sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mana laporan operasional disusun dengan menggunakan basis akrual yaitu seluruh transaksi ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan. Pada laporan operasional tidak ada penambahan pos-pos yang menyajikan hasil operasi suatu entitas pelaporan.

Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Hasil Penelitian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara sudah meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Serta Pengungkapan –Pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

CALK telah disajikan secara sistematis. setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional Dan Laporan Perubahan Ekuitas dapat mempunyai refrensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi laporan keuangan terkait Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara sebenarnya telah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengatur berbagai item yang mencakup berbagai komponen. Bentuk laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran berlebih (SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas (LPE) dan laporan keuangan kompilasi data rinci. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan hanya menyediakan lima komponen laporan keuangan, tanpa memberikan laporan saldo anggaran lebih (SAL) dan laporan arus kas. Menurut wilayah. / Bendahara Daerah, dan laporan arus kas Semua arus kas dari organisasi, baik

yang masuk maupun yang keluar, telah dicatat secara spesifik dan akurat, kemudian diserahkan oleh Bendahara Kabupaten/Provinsi.

Laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara telah terbukti kebenarannya dalam penerapan sistem akrual dan sistem realisasi pembayaran. Basis akrual digunakan dalam informasi keuangan untuk mengkonfirmasi pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas LO. Pada saat yang sama, sistem pembayaran digunakan untuk pendapatan dan pengeluaran LRA.

Dapat juga dilihat dari data-data yang telah diberikan dan ditelaah sebelumnya bahwa terdapat tambahan unsur-unsur laporan keuangan atas aset tetap, dan telah dibahas akumulasi penyusutan, karena selama kapasitas terus menurun, aset tentu saja, mereka akan terus menurun. Karena berbagai alasan, berbagai kegiatan dan kegiatan pemerintah akan memakan dana selama proses pelaksanaannya, dan setelah itu, aset tetap pada akhirnya akan terus menurun.

5.2 Saran

1. Berdasarkan penilaian menyeluruh, mungkin lebih baik jika instansi terkait dapat memberikan lebih banyak komponen atau elemen laporan keuangan berupa perubahan saldo anggaran dan dana surplus, diikuti dengan laporan arus kas. Memang benar bahwa kedua hal ini tidak termasuk dalam laporan keuangan (CaLK), tetapi keberadaannya masih dapat digali dan digunakan sebagai pendataan atau semacam arsip institusi, karena suatu saat informasi tersebut akan diperlukan.
2. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, diharapkan Instansi bisa lebih meningkatkan pelaporan keuangan yang disajikan agar dapat dipahami bagi para peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyrofi, M. z. (2016). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. http://eprints.undip.ac.id/49899/1/01_ASYROFI.pdf, 5.
- Desipradani, g., & Rusmawati, z. (2017). penyajian laporan keuangan pemkot surabaya dalam penerapan PP No. 71 tahun 2010. *balance economic, business, management and accounting journal*
- Dharmaningtyas, d. (2016). pengaruh kewajaran penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan. <https://core.ac.uk/display/78026184>.
- Fajar A, m. (2018). analisis penerapan standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah kabupaten kotawaringin barat provinsi kalimantan tengah). <https://eprints.umm.ac.id/40407/1/pendahuluan.pdf>, 5.
- Fauziah, i. (2018). *SAP standar Akuntansi pemerintahan sesuai peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010*. jakarta, 12730, indonesia: penerbit ilmu.
- Hardiningsih, p., Januarti, i., Srimindarti, c., & Meita oktaviani, r. (2019). does the characteristic of regional government and complexity effect on the disclosure regional financial statements. *jurnal Akuntansi dan auditing indonesia*.
- Haryadi, e. s., kamaliah, & Ratnawati, v. (2015). analisis pengungkapan (disclosure) laporan keuangan kabupaten yang meraih opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut. https://www.researchgate.net/publication/313902279_analisis_pengungkapan_disclosure_laporan_keuangan_kabupaten_yang_meraih_opini_audit_tanpa_pengecualian_wt_p_dua_tahun_berturut_turut, 184.
- Ikhsan ridha, s. (2018). analisis pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan entitas pemerintah daerah aceh (studi kasus pada masjid raya baiturrahman). *jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi Akuntansi jimeka*.
- Kumar, p., & Firoz, m. (18 october 2019). accounting for certified emission reductuins (CERs) in india : an analysis of the disclosure and reporting practices within the financial statements. *emerald insight discover journals, books & case studies*.
- Kurnia shanti, y. (2018). analisis penerapan basis akrual atas standar Akuntansi pemerintah No 71 dan dampaknya pada penyajian laporan keuangan (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah

- kecamatan ciputat timur). *jurnal Akuntansi berkelanjutan indonesia* .
- Lombar dini, a. (2018). analisis pengungkapan laporan keuangan pemerintah kota manado tahun 2015. *jurnal riset Akuntansi going concern* , 496.
- Marsella, c., & Aswar, k. (2019). an investigation of financial statement disclosure in local government financial statements. *international journal of business & economic affairs* , <http://www.ijbea.com/papers/volume4-issue6/IJBEA-2019-46002.pdf>.
- Muzarrafah, m., Majid, j., & anwar, p. h. (2019). disclalaimer opinion : pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *jurnal ilmiah Akuntansi peradaban* .
- Priyastiwi, p., & Saputra, n. (2019). pengaruh kinerja keuangan dan karakteristik daerah terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. *jurnal riset manajemen* .
- Sukmadilaga, c. (2015). good governance implementation in public sector : exploratory analysis of government financial statements disclosures across ASEAN countries. *procedia social and behavioral sciences* .
- Suryaden, s. (2020). *PP 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintah*. jogloabang.com.
- T.Rich, k., Roberts, b., & Zhang, j. (2017). linguistic tone pf municipal management discussion and analysis disclosures and future internal control quality. *journal of govermental and nonprofit accounting forthcoming*